

**ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP PRAKTIK *WAKALAH*
JASA CALO PEMBUATAN SIM DI KECAMATAN BALONGPANGGANG
KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

**Oleh
Nurrohmah Kartika Devi
NIM. C02216055**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2020

LEMBAR PERTANYAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

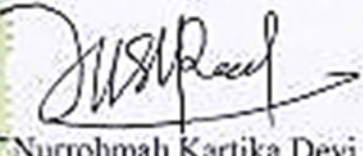
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurrohmah Kartika Devi
NIM : C02216055
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Judul : Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Praktik *Wakalah* Jasa Calo Pembuatan Sim di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Nurrohmah Kartika Devi

NIM. C02216055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis *Mas{lah{ah Mursalah* terhadap Praktik *Wakalah* Jasa Calo Pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik” yang ditulis oleh Nurrohmah Kartika Devi NIM. C02216055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juli 2020

Pembimbing,



Dra. Nurhayati, M. Ag.,

NIP. 1968062719920320001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurrohmah Kartika Devi NIM. C02216055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqah Skripsi

Penguji I

Dra. Nurhayati, M. Ag.
NIP.196806271992032001

Penguji II

Dra. Hj. Mulikhatul Khoiro, M. Ag
NIP.197004161995032002

Penguji III

Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV

Ahmad Safiudin R., M.H
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 03 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP.195904041988031003

Lembar Pernyataan Publikasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurrohmah Kartika Devi
NIM : C02216055
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : kartikadevhy016@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Wakalah Jasa Calo Pembuatan SIM di Kecamatan

Balongpanggang Kabupaten Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Pebruari 2021

Penulis


(Nurrohmah Kartika Devi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Praktik *Wakālah* Jasa Calo Pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik” guna menjawab permasalahan bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik *wakālah* jasa calo SIM di Kecamatan Balongpanggang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sasaran wawancara pada penelitian ini adalah orang yang menggunakan jasa calo, pihak kepolisian, dan orang yang menjadi calo pembuatan SIM. Kemudian, untuk dokumentasi yang dikumpulkan adalah data tentang tarif pembuatan SIM, prosedur atau skema permohonan SIM. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan *maṣlahah* dengan pola pikir deduktif, yaitu menyimpulkan dari yang umum pada yang khusus. Sehingga dapat menarik kesimpulan terkait data tentang praktik *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang.

Penulis menyimpulkan bahwa praktik jasa calo pembuatan SIM ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *wakālah*, yaitu adanya orang yang memberi kuasa, ada pihak yang menerima kuasa, sesuatu yang dikuasakan dan *ṣighat ijab*. Kemudian, hasil analisis metode hukum Islam *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik jasa calo pembuatan SIM dapat dikategorikan menjadi dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah apabila pengguna jasa calo pembuatan SIM pada waktu kepengurusannya mempunyai uzur maka hal ini boleh menggunakan calo SIM.

Berbeda hasilnya dengan kriteria yang kedua, yaitu praktik ini tidak diperbolehkan dilakukan, dengan alasan jika pengguna jasa calo hanya dengan alasan malas untuk mengurus SIM. Hal ini dinilai tidak efektif dan efisien, karena tidak adanya keadaan yang darurat sehingga dapat menyebabkan kerugian berupa kurangnya edukasi dan ketaatan pemohon SIM secara prosedural.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, guna mencapai tujuan yang baik. Maka, disarankan kepada pihak-pihak, yakni hasil dari penelitian dapat digunakan oleh masyarakat maupun pihak yang bersangkutan di Kecamatan Balongpanggang sebagai dasar pertimbangan dan rujukan mengenai penggunaan jasa calo pembuatan SIM.

macam metode hukum Islam, diantaranya adalah *maṣlahah mursalah*, *al-urf*, *istihsān*, *istiṣhāb*, *sad adh-dharī'a*, dan lain-lain.

Penerapan metode-metode istinbat tidak luput jika dikaitkan dengan masa yang sekarang. Banyak hal yang dijumpai tetapi belum tentu telah diterangkan dalam hukum Islam, namun hal-hal tersebut perlu dianalisis melalui adanya pengkiasan ataupun dengan metode istinbat yang ada.

Seperti seorang pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Salah satu persyaratan wajib bagi pengendara sepeda atau mobil harus mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai dengan jenis kendaraan yang akan dikemudikan.

Fakta yang ada di lapangan, proses pembuatan SIM tidaklah mudah, karena banyak langkah yang harus dilakukan oleh pemohon. Banyaknya langkah yang harus dilakukan oleh pemohon SIM ini memberikan peluang bagi orang-orang yang ingin memanfaatkannya secara ilegal. Orang-orang ini biasa disebut dengan calo.

Pengertian calo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, dan dapat disebut sebagai perantara atau makelar.

Seorang calo akan memberikan penawaran khusus berupa jasa pembuatan SIM dengan mudah dan cepat, namun jasa ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Melainkan ada harga yang melebihi batas standar yang harus dibayar oleh pemohon SIM kepada calo. Meskipun begitu, hal ini tidak mengurangi peminat bagi pemohon SIM untuk tetap menggunakan jasa calo.²

Mengenai penerapan jasa calo pembuatan SIM yang menjadi kebiasaan masyarakat di beberapa daerah khususnya di Kecamatan Balongpanggang. Praktik jasa calo SIM menggunakan akad *wakālah* tidak dijumpai dalam Alquran maupun hadis secara mendetail. Namun Alquran dan hadis ini dijadikan sebagai rujukan melalui jalan metode istinbat hukum.

Pada kesempatan kali ini metode istinbat yang digunakan metode istinbat *maṣlahah mursalah*. Alasannya adalah karena masyarakat yang mempertimbangkan pembuatan SIM menggunakan jasa calo lebih memudahkan, lebih cepat bahkan lebih singkat daripada membuat SIM yang dilakukan diri sendiri yang seringkali mengalami kegagalan dikarenakan banyak sebab, khususnya pada ujian praktik.

² <http://www.pungli-dan-calo-sim-di-jabodetabek-ombudsman-bebas-berkeliaran.com>, diakses Selasa, 4 September 2018

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Praktik akad *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
3. Analisis *istiḥsān* terhadap praktik *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian yang telah ada.³

Penelitian yang berjudul ”Analisis *Maṣlahah* terhadap Praktik *Wakālah* Jasa Calo Pembuatan Sim di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik”, sebenarnya telah dibahas pada skripsi atau jurnal sebelumnya, namun berbeda kasus dan permasalahan sebagai berikut;

1. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Negeri Surabaya yang ditulis oleh Adhithia Herdian Mulya Laksmi dan Ari Wahyudi yang berjudul “Rasionalitas Pengguna Jasa Calo dalam Kepengurusan SIM Baru di Polres Sidoarjo”. Isi dari jurnal ini menyimpulkan bahwa, pengguna jasa calo SIM masih sangat banyak, pemberian harga yang tinggi tidak mengurangi minat seorang pemohon SIM untuk menggunakan jasa calo. Seperti di Polres Sidoarjo, pengguna jasa calo tidak keberatan dengan harga yang tinggi dan tetap saja digunakan oleh banyak orang.

Tindakan menggunakan jasa calo merupakan tindakan tradisi, yang sudah menjadi tradisi turun temurun dari keluarga atau orang terdekatnya. Hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya adalah karena pemohon SIM Baru sudah berkali-kali mengalami kegagalan dalam ujian praktik merasa terbantu. Selain itu calon pemohon SIM menggunakan

³ Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk teknik penulisan skripsi* (April 2016), hal. 8.

Guna mengetahui perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan skripsi mahasiswa Universitas Jendral Sudirman Fakultas Hukum yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes” disusun oleh Tanty Kusuma Digdani.

3. Jurnal ekonomi Islam karya Muhammad Fatah Ilhamy dan A'razy Fahrullah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ijārah* dalam Kepengurusan SIM Melalui Jasa Makelar”, dalam skripsi ini membahas mengenai transaksi akad *ijārah* tersebut, selain itu juga dibahas mengenai argumentasi dari pihak SATPAS Colombo yang menyatakan larangan pengurus SIM melalui jasa makelar sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1980 mengenai suap menyuap.⁶

⁶ Ilhamy, Muhammad Fatah, dan Fahrullah, A'rasy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Dalam Kepengurusan SIM Melalui Jasa Makelar", (Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, 2019)

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui hasil dari analisis metode hukum Islam *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Skripsi dengan judul Analisis Metode Hukum Islam *Maṣlahah Mursalah* terhadap Praktik *Wakālah* Jasa Calo Pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik memiliki kegunaan atau manfaat baik untuk penulis maupun pembaca khususnya pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini mengandung dua aspek yaitu;

1. secara teoritis hasil penelitian dapat menambah wawasan keilmuan kepada pembaca untuk memahami hukum akad *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Lokasi penelitian sebagai objek dari penelitian yaitu di tempat terjadinya transaksi akad *wakālah* jasa calo pembuatan SIM yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Balongpanggang

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka data yang dapat dikumpulkan adalah:

- Tarif permohonan SIM.
- Syarat-syarat permohonan SIM.
- Prosedur permohonan SIM.
- Aturan bebas tentang fakta calo.
- Proses transaksi jasa calo.
- Alasan masyarakat pengguna jasa calo pembuatan SIM.

Penelitian ini memuat dua sumber data, yaitu;

a) Sepuluh orang pengguna jasa calo SIM yang berdomisili di Kecamatan Balongpanggang, yaitu Nurul Zaidan (guru), Nuril Imamah (guru), Almira Devi (wiraswasta), Masykur Hadhi (wiraswasta), W. Wahyu Pratama (Pegawai Bank), Binti Kasiyah

(ibu rumah tangga), Dinda Kumala (mahasiswa), Yulianti (mahasiswa), Yesi (karyawan), Isnaeni (karyawan).

b) Pihak kepolisian Kabupaten Gresik yaitu Aipda Totok Purwanto
(Paur Log Subbag Sarpras)

c) Satu orang calo pembuatan SIM dengan inisial nama AA
(pedagang)

2) Sumber sekunder adalah tempat diperolehnya data dari buku, dan lain-lain terkait dengan objek penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a) *Website* resmi KORLANTAS Polri yang menjelaskan tentang informasi permohonan SIM.

b) Brosur atau pamflet yang terkait dengan prosedur atau informasi permohonan SIM.

c) *File* pdf yang berisikan tentang aturan-aturan dalam melakukan permohonan SIM.

5. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁸ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

⁸ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Prenadamedia, 2014), hal.138

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁹ Mengenai hal ini wawancara dilakukan dengan tiga pihak yang bersangkutan yaitu pihak kepolisian Kabupaten Gresik, pengguna jasa calo pembuatan SIM Kecamatan Balongpanggang dan calo pembuatan SIM. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data berupa informasi transaksi praktik calo, alasan-alasan yang melatarbelakangi menggunakan jasa calo pembuatan SIM, prosedur permohonan SIM yang ada di SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan data kualitatif yang berisi tentang beberapa fakta terkait objek yang akan diteliti dan data tersimpan dalam bentuk dokumen.¹⁰ Data diperoleh adalah data tentang tarif pembuatan SIM, prosedur atau skema permohonan SIM yang disertai oleh bukti yang akan terlampir.

6. Teknik Pengelolaan Data

Semua data-data yang telah diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Andi Offset, 1991), hal. 193

83. Choliq Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal.

- yang telah didapatkan yaitu data hasil wawancara, *file* peraturan pembuatan SIM, proses terjadinya transaksi berskala pembuatan SIM, *website* resmi KORLANTAS I mengatur tentang pembuatan SIM dan kan digunakan sumber-sumber studi dokumentasi.¹² Dalam hal ini per melakukan *editing* terhadap data dan dokumen terkait serta hasil wawancara yang dilakukan kepada para peng calo, calo, dan pihak kepolisian, brosur atau pamflet pembuatan SIM.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang terstruktur

¹³ Andi Praswoto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 210

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menganalisis data yang ada dengan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu analisis *maṣlahah mursalah* terhadap praktik *wakālah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang akan dikaji dengan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik jasa calo pembuatan SIM dari sudut pandang metode hukum Islam.

[illegible]

Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, penulis membagi lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan, dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub-sub. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori, bab ini meliputi sub bab-bab bahasan, yaitu: sub-sub pertama pengertian *maṣlaḥah mursalah*, ruang lingkup *maṣlaḥah mursalah*, syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam *maṣlaḥah mursalah*, pengertian *wakālah*, legitimasi hukum akad *wakālah*, rukun dan syarat *wakālah*, macam-macam *wakālah*.

[illegible]

SIM, yang didalamnya ada subbab-subbab yaitu . Kedua, praktik transaksi akad wakalah jasa calo pembuatan surat izin mengemudi.

Bab keempat merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu: sub bab pertama membahas analisis praktik *wakalah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Sub bab kedua membahas tentang analisis *masalah mursalah* terhadap praktik *wakalah* jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Bab kelima merupakan pembahasan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, yang berisi mengenai jawaban dari rumusan dan saran.

KONSEP *MAŞLAḤAH MURSALAH* DAN *WAKĀLAH*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Kata *maṣlahah* berakar pada kata الأصل yang merupakan bentuk masdar dari kata صَلَحَ - يَصْلُحُ - صَلَاحًا yang mempunyai makna baik atau positif.¹⁴ Sedangkan ditinjau dari segi bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa arab menjadi kata *maṣlahah*, yang memiliki arti mendatangkan kebaikan, membawa kemanfaatan, dan menolak kerusakan.¹⁵ Kemudian, kata *mursalah* mempunyai arti tidak terikat dengan dalil agama yang bersumber dari Alquran dan hadis.¹⁶

Maṣlahah Mursalah dalam arti umum adalah mutlak, kemudian menurut istilah ulama ushul mengartikan kemaslahatan yang oleh syari tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara yang dapat menunjukkan dianggap atau tidak kemaslahatan tersebut.¹⁷

Imam al-Ghazali memaparkan bahwa pada dasarnya *maṣlaḥah* adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Guna meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 110.

tersebut tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksud dengan tetap memelihara tujuan syarak.

Imam al-Khawarizmi, seorang ulama yang menemukan teori aljabar yang memberikan definisi dari *maṣlahah*. *Maṣlahah* adalah memelihara tujuan syarak dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia.

Adapula pendapat dari Said Ramadhan al-Buthi yang mengungkapkan maksud dari sebuah kemaslahatan. Manfaat yang dimaksudkan oleh Allah SWT. adalah untuk kepentingan hamba-hambaNya, baik dalam hal pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan jika, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan maupun harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dikategori tersebut.

Menurut ahli usul fikih, yang dimaksud dengan *maṣlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh syari dalam wujud hukum dengan tujuan mencapai kemaslahatan selagi tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkannya. Oleh karena itu *maṣlahah* dianggap mutlak karena tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.¹⁸

Pemaparan *maṣlahah mursalah* dapat diartikan secara umum dilatarbelakangi karena tidak dibatasi oleh bukti yang dapat dianggap atau bukti yang disia-siakan. Seperti contoh kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan dicetaknya uang kartal, uang logam, pembangunan penjara, dapat berupa kemaslahatan lain

¹⁸ Sayfuddin Abi Hasan Al-Amidi, *Al-Ahkam fi ushul al-Ahkam*, (Riyadh: Muassasah Alhalabi, 1972), hal. 142

karena kebutuhan yang mendera, atau demi terciptanya kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya.

2. Landasan Hukum *Maṣlaḥ ah Mursalah*

Landasan hukum *maṣlaḥah mursalah* dapat ditemukan di Alquran, sebagai berikut:

1. QS. Yunus: 57-58

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ

بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*”⁴⁹

2. *As-sunnah* yang digunakan sebagai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode *maṣlaḥah mursalah* adalah HR. Ibnu Majjah:

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبا نا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة من

ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار.

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al Jufiyyi dari Ikrimah dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya), pada

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1984), hal. 659

Berdasarkan landasan hukum tersebut, menurut Syaikh Izzudin bin Abdul Salam mengemukakan, bahwa masalah fiqhiyah dikembalikan pada kaidah fiqh, yaitu;

- ### 3. Syarat-syarat *Maṣlaḥ ah Mursalah*

Kemudian, untuk mencapai kemurnian metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan dasar hukum Islam. Maka ada unsur yang harus dipenuhi, yaitu;

- ²⁰ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 784.
- ²¹ Jalaludin Al-Suyuthi, *Al Asbah wa al-nadzo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hal. 31

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf

- ## 2. Menurut Jumhur Ulama

- ²²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 123

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut menggambarkan bahwa ulama sangat memperhatikan sisi kehati-hatian dalam menggunakannya karena *maṣlahah mursalah* digunakan oleh ulama ketika ada hal-hal yang belum ditemukan petunjuk hukumnya.

Telah dijelaskan pada awal pembahasan, bahwa syariat Islam mempunyai orientasi pada kemanfaat dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatannya tersebut. Maka dalam hal ini *masalah* dapat dibagi berdasarkan kategorinya, yaitu :

- ²³ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 24.

3) *Maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara melalui dalil secara rinci.²⁴

1) *Maṣlaḥah dānūriyah*, yaitu kepentingan yang esensi dalam kehidupan atau kebutuhan pokok manusia didunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut terbagi menjadi lima bagian, yaitu ;

- atau yang dapat disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

[illegible]

- 26

B. *Wakūlah*

1. Pengertian *Wakūlah*

Kata *wakālah* mempunyai arti mewakilkan atau memberikan urusan. Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan disebut dengan wakil.²⁶ *Wakālah* dalam pengertian penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat juga terdapat dalam kata *Al-hifẓ* yang berarti pemeliharaan.²⁷

Secara bahasa, kata *wakālah* atau *sikalah* berarti *al-tafwīḍ* yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Contoh kalimat “Aku

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 426

²⁶ Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, (Penerbit Kashiko, 2000), hal. 693.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi'i Antonio*, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), hal. 120-121.

Kemudian, *wakālah* menurut istilah didefinisikan oleh ulama sebagai berikut;

- Menurut Pasal 20 Ayat 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dimaksud dengan *wakālah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.³¹ Maksud dari kata kuasa tersebut adalah sesuatu guna menjalankan kewajiban dan sesuatu menerima hak, seperti misalnya si A mendapatkan melakukan kewajiban dari si B untuk membelikan sepeda motor di toko ABC.

³¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 17.

Landasan *wakālah* dapat ditemukan melalui banyak dalil. Diantaranya adalah dalam firman Allah Swt. sebagai berikut;

- وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِنَتَّسَعَّلُوا مِنْهُمْ قَالَ قَاتِلْ مِنْهُمْ كَمَ لَيْسَ لَكُمْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَكُمْ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

[illegible]

Hadis yang dapat menunjukkan keabsahan *wakālah*, diantaranya adalah;

Artinya: “Dari Sulaiman ibn Yasar sesungguhnya Rasulullah saw mengutus Abu Rafi’ dan seorang laki-laki dari kalangan anshar untuk menikahi Maimunah binti al-Harits sedangkan Rasulullah ketika itu di Madinah sebelum keluar.”³⁴

Rukun *wakālah* menurut jumhur ulama dibagi menjadi empat, yaitu orang yang memberi kuasa (*muwākil*), orang yang menerima kuasa (*wakil*), objek atau sesuatu yang diwakilkan (*muwākil bih*) dan ijab dan qabul (*ṣighat*).³⁵

Sementara itu, rukun *wakālah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam Pasal 452 Ayat (1) adalah *wakil*, *muwakil* dan akad.³⁶

Syarat *muwakil* sebagai berikut;

³⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 123.

- b) pemberi kuasa memiliki hak atas sesuatu yang dikuasakan. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah *mumayyiz* tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun *madhab* Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah *mumayyiz* pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.³⁷

- a) dianggap sah oleh syariat dalam menjalankan apa yang ia wakikan.;
- b) seorang *wakīl* harus cakap hukum.;
- c) seorang *wakīl* memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Hal ini sebagai bukti bahwa *wakīl* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali karena kesengajaannya.

a) dapat digantikan kepada orang lain;

[illegible]

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hukumnya tidak sah (tidak boleh). Karena syarat keabsahan *wakālah* itu *muwakil bih* (objek) harus diketahui sehingga tidak mengandung penipuan (*gharar*).⁴²

Dari sisi waktu pelaksanaan, transaksi *wakālah* dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. *munājazah*, yaitu transaksi *wakālah* yang dapat dilakukan secara langsung. Seperti ungkapan “saya wakilkan kepada kamu untuk menjual rumahku ini”
- b. *mudāfah*, yaitu transaksi *wakālah* yang disifati dengan sifat tertentu. Seperti ungkapan “saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua urusan saya mulai bulan depan”
- c. *mu’allaqah*, yaitu transaksi *wakālah* yang digantungkan pada suatu perbuatan tertentu dimasa yang akan datang. Seperti ungkapan “jika besok saya belum datang dari bepergian, saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua urusan saya.”⁴³

Kemudian dari sisi keleluasaan, transaksi *wakālah* dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. *Muqayyadah*, yaitu transaksi *wakālah* yang mana orang yang mewakilkan menjelaskan kepada wakil mengenai cara bertindak hukum. Seperti ungkapan “saya mewakilkan kepadamu untuk menjual mobil saya ini dengan harga 100 juta secara kontan atau

⁴² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hal. 304.

⁴³ Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal. 158.

b. *Mutlaqah*, yaitu transaksi *wakālah* yang mana *muwakil* tidak membatasi apapun terhadap tindakan hukum *wakil*. Seperti ungkapan “saya mewakilkan kepadamu untuk menjual mobil ini kepada orang lain” tanpa menetapkan berapa harga dan cara pembayarannya.⁴⁴

[illegible]

1. Pengertian Pembuatan SIM melalui Jasa Calo

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.⁴⁵ Dasar hukum yang digunakan dalam diadakannya SIM dapat dilihat pada UU. No. 2 tahun 2002 pada Pasal 14 ayat (1)b dan Pasal 15 ayat (2)c, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Pasal 216. Guna mengetahui fungsi dan peranan dari adanya Surat Ijin Mengemudi, yaitu sebagai sarana identifikasi/jati diri seseorang, sebagai alat bukti, dan sebagai sarana pelayanan masyarakat. Merujuk pada Peraturan yang Pasal 18 (1) UU No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutanjalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Masyarakat mempunyai cara pandang yang berbeda-beda tentang pembuatan SIM yang ada di SATLANTAS. Beberapa dari masyarakat

⁴⁵Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hal. 10.

berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau kereta
gandengan lebih dari 1000 kg

d. Golongan SIM C

SIM yang digunakan untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 km/jam.

e. Golongan SIM D

SIM yang digunakan untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang dengan kecepatan tidak lebih dari 40 km/jam, misalnya sepeda (bukan sepeda motor) yang ditempel mesin penggerak sehingga bisa dikendarai (berjalan di jalan umum tanpa dikayuh, walaupun perlahan saja, becak motor.⁴⁶

Pada hasil penelitian melalui wawancara bersama dengan pengguna jasa calo pembuatan SIM. Mereka menggunakan jasa calo ini sesuai dengan kebutuhan mereka, ada yang berkebutuhan pengajuan SIM untuk perjalanan ketika mereka kuliah, ada juga yang membuat SIM yang digunakan untuk perjalanan pekerjaan juga. Jenis SIM tersebut yaitu SIM A untuk kendaraan mobil dan SIM C untuk kendaraan sepeda motor.

3. Persyaratan Pemohon Pembuatan SIM Jasa Calo

Seorang pemohon sebelum melakukan pendaftaran pembuatan SIM, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sebagai berikut:

⁴⁶Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hal. 18-19.

Pembuatan SIM baru untuk mengemudikan kendaraan bermotor pengguna jasa calo ini harus menyiapkan persyaratan administrasi berupa *photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli saja.

Persyaratan kesehatan yang telah dicantumkan sesuai dengan prosedur mencakup penglihatan, pendengaran dan fisik. Sedangkan kesehatan rohani meliputi kemampuan untuk berkonsentrasi, kecermatan, pengendalian diri, dan stabilitas emosi. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dapat dibuat di klinik kepolisian atau di pusat pelayanan kesehatan yang menerbitkan surat keterangan dari dokter.

Berbeda jika seorang menggunakan jasa calo pembuatan SIM.
Persyaratan ini tidak diminta oleh seorang calo karena tidak dibutuhkan.

Ketika persyaratan sudah disiapkan, selanjutnya yaitu mengisi formulir permohonan SIM dan membayar sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Pengisian formulir ini harus sesuai dengan identitas data pribadi dengan benar, kemudian diserahkan kepada petugas loket yang

a. Tes Teori (tuliskan atau *computer based test*)

Tes tulis ini berisikan tentang soal-soal yang berkaitan proses mengemudi yang baik/etika berkendara dan rambu-rambu lalu lintas yang disajikan dalam bentuk soal *Computer based test* (CBT) diruangan yang dijaga oleh petugas polisi. Setelah mengertjakan, maka nilai akan langsung muncul dan akan dapat dinyatakan keterangan lulus atau tidak lulus.

b. Tes Praktik

Tes praktik ini pemohon SIM diminta untuk mempraktikkan cara serta kemampuan dalam berkendara sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan kendaraan bermotor yang akan diajukannya.

Ada beberapa halau rintangan yang sudah disediakan, dan pemohon harus bisa melewati halau rintangan sesuai dengan standart kelulusan tes praktik yang telah ditentukan.

Apabila dalam tes praktik membuahkan hasil gagal, maka dapat datang seminggu kemudian untuk melakukan tes praktik lagi tanpa mengulang tes teori.

Sedangkan jika seorang pemohon SIM menggunakan jasa calo pembuatan SIM akan berbeda lagi. Pengguna jasa calo SIM tidak perlu melakukan tes praktik maupun tes teori. Namun ada beberapa pengguna jasa calo SIM ini tetap melakukan tes teori tetapi tidak perlu melakukan tes praktik dengan tujuan hanya sebagai formalitas belaka.

memberikan rekomendasi kepada tetangga, keluarga atau teman bagi yang ingin membuat SIM melalui jasa calo.

Merujuk kepada sumber informasi yang telah didapat melalui hasil wawancara kepada informan pengguna jasa calo pembuatan SIM, yaitu transaksi bersama calo SIM ini berawal pada saat pemohon SIM berjumpa dengan seorang calo ditempat permohonan SIM. Kemudian mereka melakukan perbincangan dan saling bertanya.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan persyaratan administrasi yang harus disiapkan pemohon SIM seperti foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP), jangka waktu pembuatan SIM dapat dicetak dan diambil, serta tarif permohonan SIM melalui jasa calo.

Merujuk pada data yang telah didapat melalui hasil wawancara para informan pengguna jasa calo pembuatan SIM mempunyai hasil yang berbeda-beda. Hal ini diketahui dari hasil wawancara yang menceritakan bagaimana seorang pengguna jasa calo pembuatan SIM bertemu dengan seorang calo.

“Ringkas cerita, saya mendapatkan informasi jasa calo SIM yang cepat dan tidak menyita waktu dari teman saya” hal ini di ungkapkan oleh salah satu informan yang berprofesi sebaga guru.⁴⁸ Selain itu ada informan yang menyatakan, “Saya dibantu oleh paman saya, beliau mempunyai kenalan orang calo pembuatan SIM yang kebetulan menjadi temannya. Akhirnya

⁴⁸ Nurul Zaidan, wawancara, Balongpanggang, 2 April 2020

Ketiga informan tersebut menyampaikan bahwa mereka bertemu dengan calo atas rekomendasi dari teman atau keluarganya. Diketahui juga bahwa orang yang memberikan rekomendasi sebelumnya juga telah menggunakan jasa calo pembuatan SIM ini, mereka menilai bahwa para calo mampu dalam hal pembuatan SIM dengan cepat.

Pada sisi lain, ada informan yang memberikan informasi bahwa mereka bertemu para calo di lingkungan sekitar pengurusan SIM tepatnya di tempat parkir sepeda. Seperti yang telah diungkapkan salah satu informan, “Ketika hendak menuju ke kantor, saya bertemu dengan calo di tempat parkir sepeda, dan akhirnya saya dan calo tersebut melakukan percakapan di tempat itu.” ungkap salah satu informan yang berdomisili di Desa Balongpanggang.⁵¹

Namun, berbeda dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, ada suatu peristiwa yang tidak dapat disangka. Calo SIM ini membawa kabur uang yang telah diberikan oleh pengguna jasa calo. Meskipun begitu pengguna jasa calo ini tidak tinggal diam, pengguna jasa tersebut sudah

⁵¹ Dinda Kumala, wawancara, Balongpanggang, 28 April 2020

sempat mendatangi ke rumah calo dengan tujuan ingin meminta agar uangnya kembali, tetapi upaya tersebut tidak menghasilkan apa-apa kecuali kekecewaan.⁵²

Pelbagai cerita fakta telah diutarakan oleh beberapa informan tersebut maka dapat diketahui bahwa seorang calo dapat ditemui di banyak tempat, seperti di lingkungan sekitar maupun disekitar tempat pembuatan SIM, selain itu mereka juga dapat dicari.

Setelah pengguna jasa calo dan calo tersebut bertemu atau berkomunikasi dengan media sosial. Mereka membuat janji temu untuk menyerahkan berkas-berkas yang harus disiapkan guna pembuatan SIM, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang berprofesi sebagai karyawan ini, “saya bertemu calo itu di parkir, kemudian bertanya persyaratan dan langsung saya serahkan uang. Namun tidak lupa saya meminta nomer telpon calo tersebut yang dapat untuk dihubungi.”⁵³

Persyaratan-persyaratan tersebut tidak disebutkan secara detail seperti halnya persyaratan pembuatan SIM secara prosedural. Namun, hanya membutuhkan foto copy KTP dan foto langsung oleh pemohon pembuatan SIM, dengan begitu SIM akan segera diproses oleh calo.

C. Alasan Masyarakat terhadap Transaksi Jasa Calo

Aturan saat mengendarai kendaraan bermotor seperti motor, mobil atau kendaraan bermotor lainnya adalah memiliki SIM. SIM tersebut sebagai tanda

⁵² Yulianti, wawancara, Balongpanggang, 2 Mei 2020

⁵³ Yesi, wawancara, Balongpanggang, 19 April 2020

bisa dirasakan secara nyata. Seperti ungkapan dari salah satu informan yang bekerja sebagai seorang karyawan.⁵⁹

ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP

DI KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK

Pada kehidupan sehari-hari manusia melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain melakukan pekerjaan, manusia juga mempunyai kewajiban untuk memehui tanggungjawabnya, yang terkadang kewajiban tersebut tidak dapat dikerjakan secara mandiri, melainkan membutuhkan bantuan orang lain untuk mencapainya.

Akad *wakalah* adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh jika seseorang mengalami kesulitan untuk mengerjakan sesuatu dan meminta tolong kepada pihak lain untuk membantu menyelesaikan kewajiban di waktu yang bersamaan. Sehingga orang yang mendapatkan kuasa tersebut bertindak sebagai pengganti pihak pertama dalam melakukan kewajiban tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Tujuan inti dari akad wakalah tersebut adalah agar pekerjaan atau kewajiban dapat selesai dalam waktu yang tepat. Dengan demikian setiap peluang yang ada selalu bisa diikuti walaupun pihak yang berkepentingan hanya satu orang saja, tetapi dia dapat mewakilkannya kepada pihak yang lain dengan tujuan menyelesaikan pekerjaannya.

Dapat diambil salah satu contohnya adalah seseorang yang sedang bekerja keras yang setiap harinya harus mengendarai kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil atau sejenisnya. Maka, dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi yaitu wajibnya mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kewajiban untuk memiliki SIM tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, namun pada fakta yang terjadi dilapangan tepatnya masyarakat di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Praktik permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut tidak dilakukan oleh semua orang dengan mandiri, melainkan ada golongan masyarakat yang lebih memilih menempuh jalan alternatif melalui calo Surat Izin Mengemudi (SIM).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa calo ini begitu sederhana, dimulai dari membuat perjanjian dengan bertatap muka atau lewat media sosial, memberikan persyaratan administrasi, menunggu untuk waktu foto lalu menunggu pencetakan Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah dapat diambil dan dipergunakan.

Para calo ini biasanya dapat ditemui dilokasi ketika orang akan membuat SIM, ada juga bertemu berkenalan melalui rekomendasi dari teman, keluarga, atau kerabat yang membagikan informasi tentang calo itu.

Praktik calo mempunyai dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari calo adalah seseorang tidak merasa mengalutkan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, karena pekerjaan yang lain telah

dilimpahkan kepada orang lain, proses yang sederhana dan dapat dikatakan sudah pasti jadi tanpa menimbulkan kegagalan permohonan SIM.

Dampak negatif dari calo adalah dapat dirasakan dan dilihat dari yang paling menonjol yaitu pemohon jasa calo ini harus membayar biaya dengan harga yang tergolong tinggi, dan sudah jelas hal itu melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Namun, pengguna jasa calo SIM tersebut tidak mempermasalahkan hal tersebut, tapi mereka melakukannya dengan suka sama suka demi mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diinginkan. Pembayaran jasa calo SIM tersebut juga dilakukan dimuka, jadi berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pemohon jasa calo SIM ini harus membayar terlebih dahulu agar dapat diproses.

Berasaskan fenomena yang terjadi, praktik akad *wakālah* yang telah dilakukan oleh masyarakat dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan persyaratan yang sesuai, pada analisis kali ini menggunakan rukun dan syarat *wakālah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diatur dalam Pasal 452 ayat (1) sebagai berikut;

Rukun dan syarat *wakālah* dibagi menjadi empat:

1. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/melimpahkan kekuasaan).

Syarat *muwakil* sebagai berikut:

- a) seseorang yang mewakili, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk mengelola pada bidang-bidang yang

b) pemberi kuasa memiliki hak atas sesuatu yang dikuasakan.

Seseorang yang mewakili disini yang dimaksudkan adalah pengguna jasa calo pembuatan SIM, yang sudah berumur minimal 17 tahun dan memenuhi persyaratan pembuatan SIM baru.

a) dianggap sah oleh syariat dalam menjalankan apa yang ia wakikan.;

c) seorang *wakīl* memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Hal ini sebagai bukti bahwa *wakīl* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali karena kesengajaannya.

[illegible]

3. *Muwakal fih* (sesuatu yang diwakilkan) dengan syarat *muwakil* sebagai berikut;

- Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syariat Islam.

4. *Shighat Ijab* (ucapan serah terima, pihak muwakkil harus berupa ucapan yang mengindikasikan kerelaan. Sedangkan qabūl dari pihak

[illegible]

pernyataan informan yang menjadi seorang calo yang mengatakan, bahwa dia tidak memberikan info kepada pengguna jasa calo SIM bagaimana dia bisa melakukan proses pembuatan SIM dengan mulus.

setelah sudah diketahui bagaimana seorang calo dapat bertindak dalam melakukan aksinya, diketahui juga penyebab dari seseorang yang menggunakan jasa calo dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakanginya.

Melihat permasalahan ini, pihak kepolisian telah tegas bertindak dengan cara menempatkan anggota propam dan reskrim untuk melakukan pemantauan maupun penangkapan terhadap para calo yang dinilai merugikan masyarakat. Hal ini dikarenakan seorang pemohon agar dapat melakukan pembuatan SIM secara mandiri.

Namun permasalahan calo ini dapat menghasilkan hasil yang berbeda jika ditinjau berdasarkan hukum Islam menggunakan kacamata metode istinbat hukum *maṣlahah mursalah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada landasan teori, *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu metode istinbat hukum Islam yang dapat digunakan untuk menggali suatu hukum yang belum ditetapkan.

Oleh karena itu, permasalahan ini dikupas sehingga dapat diketahui hukumnya dengan cara menganalisis dari sisi alasan masyarakat melakukan transaksi jasa calo pembuatan SIM terlebih dahulu.

Mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam melakukan aksinya, ada calo yang mencari sasaran dengan cara

Para pemohon jasa calo SIM dengan latarbelakang pekerjaan yang berbeda-beda ini juga mengaku bahwa kesulitan pada saat tes praktik yang sering kali gagal, adanya pekerjaan yang harus dikerjakan yang berakibat pengurusan ini tidak dapat dilakukan yang menyebabkan pemohon ini menggunakan jasa calo SIM.

Bersandarkan pernyataan tersebut dapat digolongkan pada *maṣlahah taḥsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan karena bersifat komplementer (pelengkap) bagi kemaslahatan yang lain.

Kebutuhan SIM ini sangatlah penting bagi orang yang berkendara kendaraan bermotor, karena SIM ini adalah salah satu legalitas yang menjadi syarat untuk pengendara kendaraan bermotor.

Transaksi praktik *wakālah* jasa calo pembuatan SIM ini dianalisis menggunakan metode istinbat *maṣlaḥah mursalah* dengan melihat syarat kebolehannya menurut pandangan ulama. Hal ini dilakukan karena syariah

58

Kemudian, untuk mengetahui hasil analisis *maṣlaḥah mursalah* pada transaksi *wakālah* jasa calo SIM yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, harus dipenuhi beberapa persyaratan menurut jumhur ulama sebagai berikut:

1. *masalah* tersebut merupakan *masalah* yang hakiki, bukan prasangka.

Transaksi calo SIM dapat mendatangkan manfaat bagi penggunaanya. Hal ini telah dikemukakan oleh para informan yang telah diwawancarai. Kemasalahatan yang dapat dirasakan adalah kemudahan menyelesaikan pembuatan SIM, kemudahan untuk dapat melakukan pekerjaan yang lain, pengguna merasakan hemat tenaga dan waktu, karena estimasi waktu proses yang cepat.

2. *maṣlahah* tersebut merupakan *maṣlahah* yang umum, bukan *maṣlahah* khusus baik perorangan maupun kelompok tertentu. Maksudnya adalah banyaknya argumentasi masyarakat mengenai keluhan seringkali gagal dalam mengikuti tes praktik, dan memakan waktu yang lama.

3. *maṣlaḥah* tersebut akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan.

Berdasarkan hasil dari wawancara diketahui bahwa banyak masyarakat yang menggunakan transaksi calo. Hal ini berlandasan karena mayoritas pengguna calo dari segi pekerjaan dan waktu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti tes permohonan SIM secara mandiri.

Belum adanya hukum yang mengatur bahwa praktik jasa calo pembuatan SIM ini dilarang oleh syara berdasarkan Alquran dan hadis.

Setelah mereka melakukan tawar-menawar dengan suka rela bersepakat untuk membayar sesuai dengan nominalnya. Hal ini dikarenakan manfaat yang didapat juga sebanding dengan harga yang ditawarkan, kecepatan pembuatan, menghemat waktu, dan bisa disambi dengan melakukan pekerjaan yang lain, sehingga pekerjaan dapat selesai secara bersamaan.

[illegible]

Sehingga masyarakat melakukan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain melakukan himbauan, maka dapat dilakukan dengan memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar turut berpartisipasi mengawasi dan mengadukan jika ada yang menawarkan membantu untuk mengurus SIM, apalagi meminta imbalan yang berlebihan.

Edukasi yang perlu ditanam pada pemikiran masyarakat adalah harus dapat mempercayai diri, meskipun proses permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) amat panjang, maka hal itu tidak selamanya sulit. Melakukan tes teori dan praktik bukanlah hal yang sulit, terlebih mereka pengguna jasa calo belum pernah melakukannya.

Oleh karena itu, disarankan untuk tidak menggunakan jasa calo, karena hal itu sudah jelas menjadi tindakan yang kriminal atau kecurangan yang seharusnya dihindari.

D'Tutorial **detikcom**

SYARAT DAN PROSEDUR MEMBUAT SIM

KATEGORI SIM

SIM A Bagi pengendara kendaraan roda 4 (mobil) pribadi	SIM C Bagi pengendara roda dua	SIM D Bagi penyandang disabilitas	SIM B Pengendara kendaraan besar seperti bus, truk, dan alat berat
--	--	---	--

SYARAT ADMINISTRATIF

- Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) asli / Surat resi e-KTP yang berlaku**
Prosedur penerbitan SIM baru
- Mengisi Formulir Permohonan**
- Pengajuan golongan SIM Umum baru harus juga dilampiri dengan:**
 - a) Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi dan/atau;
 - b) Surat Izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan bagi WNA yang bekerja di Indonesia.

PROSEDUR PENERBITAN SIM BARU

- Calon peserta uji membawa bukti registrasi online dari website www.sim.korlantas.polri.go.id (apabila menggunakan aplikasi Registrasi Online)
- Calon peserta membawa syarat administrasi
- Calon peserta membawa hasil syarat kesehatan
- Calon peserta membayar PNBP SIM
- Calon peserta mengisi Formulir Pendaftaran
- Calon peserta mendaftar di Pokja Pendaftaran
- Peserta uji SIM melakukan Identifikasi di Pokja Identifikasi dan Verifikasi yang meliputi: foto, sidik jari, dan tanda tangan
- Mengikuti ujian teori. Bila lulus melanjutkan ke Ujian Praktik, bila tidak mengulang pada hari yang ditentukan
- Mengikuti ujian praktik. Bila Lulus, SIM dapat dicetak, bila tidak mengulang pada hari yang ditentukan
- Peserta menerima SIM

NASKAH: BAGUS PRIHANTORO NUGROHO | INFOGRAFIS: MINDRA PURNOMO

detiknews

Gambar 3.4 Poster Prosedur Permohonan SIM

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005
- Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 167.
- Asywadie Syukur, (Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh), Cet. I; Surabaya PT Bina Ilmu: 1990, hal. 120.
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: kencana, cet. 1, 2005
- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2002
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011
- Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif, Jakarta: Zikrul Hakim, cet. 1, 2004
- Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Penerbit Kashiko, 2000
- Syafi Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Wahbah Zuhaili, Alfiqh wa adilatuhu, penerjemah Abdul Hayyie al Katani, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Dr. H. Hendi Suhendi, Msi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press
Yogya, 2000
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muammalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga
Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*, Surabaya:
UINSA Press, 2014
- Abdul Rahman Ghazaki, dkk. *Fikih Muamalah, Jakarta: Kencana Prenanda
Media Group, 2010*
- Usman el-Qurtuby, *Al Quran Hafalan Mudah terjemah dan tajwid*, Bandung:
Penerbit Cordoba, 2018
- Ahmad Zain An-Najah, www.ahmadzain.com (Bekasi, 23 Desember 2012)
- Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*,
Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009
- www.polri.go.id tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM)
- [https://m.detik.com/oto/berita/caramembuat-sim-secara-mudah-tanpa-
calo.com](https://m.detik.com/oto/berita/caramembuat-sim-secara-mudah-tanpa-calo.com)
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang PNBP pada Polri